
IMPLEMENTASI PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KOTA PADANG PANJANGMuntaha Mardhatillah¹**Abstract**

This study aims to determine how the process of implementing a business program to increase the income of a prosperous family in the city of Padang Panjang, identify the obstacles encountered and determine the efforts taken to overcome the obstacles in implementing the program. This research is motivated by not all people from the poor who are included, efforts are not carried out collectively, the lack of participation from the III plus prosperous family group to want to act as foster father, the amount of capital provided by the government is insufficient in carrying out UPPKS activities and frequent capital. in the wrong use for consumptive purposes.

The method used in the research is qualitative using descriptive methods, because the research provides a description of the situation as it should be. The selection of informants was carried out by purposive sampling. The types of data are primary data and secondary data which are collected through observation, interview and documentation study. The validity test was carried out through source triangulation. Then the data analysis techniques used can be grouped into 3 stages, namely data reduction, presentation and drawing conclusions.

The findings of the study indicate that the implementation of the UPPKS program is in accordance with existing procedures but has not been fully able to improve the welfare of its members and has not been optimal. This can be seen from the fact that constraints are still found in implementation, the obstacles faced in implementing the UPPKS program in the City of Padang Panjang can be categorized into two forms, namely internal constraints and external constraints. Internal constraints include: weak supervision of the program, lack of capital sourced from the government, uneven coaching. And external obstacles include: the use of aid funds that have not been maximized, the lack of creativity and innovation of several groups in finding and utilizing sources of funds, delays in repaying loans. To overcome obstacles in the process of implementing the UPPKS program, efforts were made, including including prosperous families III as foster fathers in groups, providing guidance, and obstacles originating from program participants, such as guidance regarding the real goals of the UPPKS program, implementing a ball pick-up system. against members who are stuck in payment.

Keywords: *Implementation, Community Empowerment, Poverty, UPPKS Program, Padang Panjang City*

PENDAHULUAN

Negara-negara berkembang di dunia masih banyak mengalami problematika kemiskinan Salah satu negara yang masih mempunyai masalah kemiskinan adalah Indonesia. Padang Panjang merupakan salah satu kota terkecil yang ada di Indonesia yang berada di wilayah Propinsi Sumatera Barat. Padang Panjang mempunyai luas 2.300 Ha atau sekitar 0,05 persen dari luas Sumatera Barat. Data yang didapat dari badan pusat statistik kota Padang Panjang menyatakan jumlah penduduk Padang Panjang pada tahun 2012 adalah sekitar 47.619 jiwa dan yang tercatat sebagai keluarga miskin adalah 6.548 jiwa atau sekitar 14 % dari jumlah penduduk yang ada, dan dari 14% penduduk miskin yang ada terdapat sekitar 268 jiwa penduduk miskin yang berstatus sebagai janda atau sekitar 0,6 %, hal ini tentu perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.

¹ Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan tersebut adalah melalui pendekatan pemberdayaan keluarga yang mengacu pada UU No.10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang pelaksanaannya diatur dalam Inpres Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan.

Di sini BKKBN sebagai penyelenggara pemberdayaan keluarga dari pemerintah membuat sebuah program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dengan membentuk suatu wadah kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Tujuan umum dari kelompok UPPKS adalah untuk memberdayakan ibu-ibu/wanita di bidang ekonomi sebagai upaya peningkatan penanggulangan kemiskinan dalam rangka membangun kemandirian dan ketahanan keluarga serta mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) merupakan kegiatan usaha ekonomi produktif keluarga, terutama kaum ibu dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan keluarga. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dikembangkan melalui pendekatan kelompok dengan penyediaan modal kerja dari berbagai sumber dana yang diberikan pada setiap kelompok. Kelompok ini beranggotakan dari berbagai tahapan keluarga sejahtera, mulai dari tahapan keluarga Pra Sejahtera sampai kepada Keluarga Sejahtera III Plus (Profil UPPKS 2009).

Di kota Padang Panjang sendiri, penyelenggaraan UPPKS dilaksanakan oleh kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, hal ini sesuai dengan keputusan walikota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Panjang menetapkan tugas pokok dan fungsi kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kota Padang Panjang, yaitu salah satunya melakukan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga yang mencakup program pemberdayaan ekonomi keluarga.

Kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kota Padang Panjang sebagai pelaksana dalam program Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS) di kota Padang Panjang, juga mengajak para anggota UPPKS untuk mau ikut serta ke dalam program keluarga berencana, hal ini juga sejalan dengan tugas pokok dan fungsi kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yaitu salah satunya untuk menyelenggarakan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Tabel 1.1

Daftar kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kota Padang panjang :

No	Lokasi	Nama Kelompok UPPKS
1	Kelurahan Silaing Bawah	Teratai, Flamboyan, Lili Paris
2	Kelurahan Silaing Atas	Mawar Putih
3	Kelurahan Pasar Usang	Melati II, Bunga Lidah Buaya, Anggrek, Mentari
4	Kelurahan Bukit Surungan	Busur I, Busur II
5	Kelurahan Pasar Baru	Sejahtera I, Sejahtera II
6	Kelurahan Balai Balai	Makmur II
7	Kelurahan Tanah Hitam	Sartika, Kartini, Fadhillah
8	Kelurahan Kampung Manggis	Manggis Permai, Restu Ibu
9	Kelurahan Guguk Malintang	Gumala I, Gumala II, Gilang Jaya
10	Kelurahan Koto Panjang	Sabai Nan Aluih, Garuda I, Garuda IV
11	Kelurahan Ngalau	Makmur
12	Kelurahan Ekor Lubuk	Cempaka Putih

13	Kelurahan Tanah Pak Lambik	Dahlia
14	Kelurahan Koto Katik	Merpati Putih
15	Kelurahan Ganting	Flamboyan, Bina Sejahtera
16	Kelurahan Sigando	Amanah I, Amanah II

Sumber : Kantor Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kota Padang Panjang, 2012.

Masalah yang ditemui di dalam pelaksanaan UPPKS di kota Padang Panjang adalah belum semuanya masyarakat miskin yang ikut serta ke dalam program UPPKS ini, padahal jika dilihat pada tabel 1.1 mengenai rekapitulasi masyarakat miskin kota Padang Panjang masih banyak masyarakat miskin yang membutuhkan program ini. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana dalam mengenalkan program UPPKS ini kepada masyarakat miskin yang ada di kota Padang Panjang.

Jenis usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota di dalam satu kelompok UPPKS juga bermasalah yang mana seharusnya jenis usaha yang dilakukan seragam pada setiap kelompok, hal ini bertujuan untuk memfokuskan perhatian masing-masing anggota kelompok terhadap satu usaha, apabila terjadi kendala-kendala dalam menjalankan usaha, tentu akan lebih mudah diselesaikan dengan bantuan anggota lain dikarenakan memiliki tujuan yang sama untuk memajukan usaha yang dijalankannya sehingga dapat menjalankan usaha tersebut secara kolektif. Namun yang ditemui di lapangan yaitu terdapatnya bermacam-macam usaha yang dilakukan oleh anggota UPPKS dalam satu kelompok UPPKS, selain itu masih kurangnya perhatian dari keluarga KS III (keluarga mampu) untuk ikut serta ke dalam keanggotaan UPPKS.

Masalah lain yang ditemui yaitu nya persoalan mengenai permodalan, yang mana jumlah modal yang diberikan pemerintah kepada kelompok UPPKS ini sangat terbatas, tercatat terakhir pemerintah mengeluarkan dana sebesar Rp. 100.000.000,00 pada tahun 2008. Modal awal yang diberikan pada satu kelompok UPPKS berkisar antara Rp. 2.500.000,00 – Rp. 5.000.000,00 yang dibagi kepada beberapa anggota, masing-masing kelompok UPPKS biasanya beranggotakan 10 - 20 orang anggota, hal ini mempunyai dampak terhadap produksi yang kurang berkualitas dari segi kemasan, sehingga mengurangi daya jual dari produksi yang di hasilkan oleh kelompok UPPKS itu sendiri, belum lagi modal yang diberikan kepada anggota UPPKS seringkali di salah gunakan untuk keperluan konsumtif, yang berakibat pada kurang berkembangnya usaha yang dilakukan oleh anggota UPPKS tersebut.

Selama ini masyarakat yang ikut serta ke dalam keanggotaan UPPKS merasa cukup terbantu dengan adanya program UPPKS ini, seperti contoh dalam hal permodalan, yang mana dengan adanya program UPPKS ini masyarakat miskin bisa mendapatkan bantuan modal untuk melakukan usahanya tanpa membutuhkan jaminan sebagai persyaratan dalam memperoleh pinjaman modal. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kota Padang Panjang”

Tinjauan Pustaka

1. Pemberdayaan

Menurut Edi Suharto (2005: 58) mengatakan bahwa, “Pemberdayaan menunjuk kepada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan

jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka”.

Sasaran utama pemberdayaan masyarakat melalui program UPPKS ini adalah ibu-ibu/wanita. Adapun tujuan pemberdayaan perempuan menurut Syarif Makmur (2008: 35) yaitu :1. Meningkatkan sumber daya manusia perempuan yang mempunyai kemampuan dan kemauan guna kemandirian dengan bakal kepribadian, memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Terciptanya gerak langkah yang terpadu harmonis antar sektor dan sub sektor pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan politik, LSM, tokoh dan pemuka masyarakat dan agama dalam upaya proses pembangunan perempuan. 3. Mengoptimalkan koordinasi dan keterpaduan dalam pengelolaan pemberdayaan perempuan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. 4. Berkembangnya upaya lembaga pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat dalam pengharus utamakan gender di segala bidang kehidupan.

2. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan ukuran kehidupan kelompoknya, dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut (Soekanto, 2010: 320).

Dalam pelaksanaan program UPPKS yang dimotori oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), kriteria yang digunakan untuk menentukan keluarga yang akan memperoleh bantuan pada program ini adalah kriteria yang dikeluarkan oleh BKKBN. Kriteria BKKBN untuk mereka yang tergolong miskin adalah keluarga yang berada dalam kategori pra-KS dan KS I. Adapun yang dimaksud dengan kategori pra-KS dan KS I adalah:

1. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS)

Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator ”kebutuhan dasar keluarga” (basic needs). Enam Indikator tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator ”kebutuhan dasar keluarga” (basic needs).

2. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KSI)

Yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator ”kebutuhan psikologis” (psychological needs) keluarga. Delapan indikator Keluarga Sejahtera II (KS II) atau indikator ”kebutuhan psikologis” (psychological needs) keluarga.

3. Tahapan Keluarga Sejahtera II

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator ”kebutuhan pengembangan” (developmental needs) dari keluarga. Lima indikator Keluarga Sejahtera III (KS III) atau indikator ”kebutuhan pengembangan” (developmental needs).

4. Tahapan Keluarga Sejahtera III

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator ”aktualisasi diri” (self esteem) keluarga. Dua indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator ”aktualisasi diri” (self esteem).

5. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus.

3. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Mustopadidjadja (2003: 37) menyatakan bahwa berhasil atau gagal nya suatu kebijakan tergantung pada beberapa kondisi yaitu a).Ketepatan pelaksanaan kebijakan, bagaimana sebuah kebijakan diimplementasikan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. b).Konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaannya, c).Terjadi tidaknya perkembangan di luar perkiraan.

Pada setiap kebijakan publik yang telah ditetapkan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengalami adanya keterbatasan dalam kegiatan operasionalnya sebagai suatu sumber daya yang terbatas atau dapat disebut kendala. Menurut Hansen dalam Setia Budi (2005: 27), jenis kendala berdasarkan asalnya adalah sebagai berikut:

- 1) Kendala internal, merupakan faktor -faktor yang membatasi suatu instansi yang berasal dari dalam berupa kendala sumber daya. Dalam penelitian ini kendala berupa kurang profesional nya kinerja tim pelaksana kegiatan dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Kendala eksternal, merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar instansi. Kendala dari luar dapat berupa pengaruh lingkungan tempat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin tersebut.

Kartasasmita (1995: 4) mengatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat miskin dapat dilakukan melalui tiga tahap yaitu:

- 1) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan.
- 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan, serta pembukaan akses ke berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya dalam memanfaatkan peluang.
- 3) Memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi semakin lemah, dan menciptakan kebersamaan serta kemitraan antara yang sudah maju dan yang belum maju/berkembang. Secara khusus perhatian harus diberikan dengan keberpihakan melalui pembangunan ekonomi rakyat, yaitu ekonomi usaha kecil, agar tidak ketinggal jauh, melainkan dapat memanfaatkan momentum globalisasi bagi perkembangannya.

4. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah kelompok yang melakukan kegiatan ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera yang beranggotakan, baik ibu-ibu/wanita dari keluarga prasejahtera (Pra KS), Keluarga Sejahtera I, maupun keluarga lain yang tahap kesejahteraannya lebih tinggi, baik yang belum, sedang, maupun purna peserta KB. Tujuan umum dari kelompok UPPKS adalah untuk memberdayakan ibu-ibu/wanita di bidang ekonomi sebagai upaya peningkatan penanggulangan kemiskinan dalam rangka membangun kemandirian dan ketahanan keluarga serta mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.

Secara khusus tujuan kelompok UPPKS adalah: 1. meningkatkan pemberdayaan keluarga dibidang ekonomi. 2. melatih keluarga, khususnya wanita untuk melakukan kegiatan wirausaha. 3. meningkatkan dinamika kehidupan keluarga. 4. meningkatkan peran serta keluarga dalam

pelaksanaan pembangunan di lingkungannya. 5. meningkatkan kemandirian dan ketahanan keluarga. 6. meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan.

Sasaran langsung yang dituju pada program ini adalah kaum wanita yang termasuk kategori Keluarga pra Keluarga Sejahtera (pra-KS), Sejahtera I, dan keluarga lain yang tingkat kesejahteraannya sudah lebih tinggi daripada yang akan dan sedang melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif. Sasaran tidak langsung dari kegiatan ini antara lain adalah kader pembangunan di tingkat desa, tokoh masyarakat, PLKB, dan pemberi pinjaman modal.

Para keluarga dari KPS tersebut bersama-sama dengan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) membentuk kelompok yang terdiri dari 10 sampai 20 anggota, dan memilih kepengurusan kelompok yang minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Pentingnya peranan keluarga dari KS III Plus dalam kelompok ini dimaksudkan dapat membimbing para keluarga dari KPS Plus. Biasanya pembentukan kelompok ini difasilitasi oleh PPKB-RW (Pembantu Pembina KB tingkat RW) selaku kader dan PKB (Penyuluh Keluarga Berencana) sebagai pendamping kelompok. Adapun bentuk program UPPKS tersebut adalah:

- a. Modal. Modal menjadi salah satu permasalahan utama bagi kelompok UPPKS yang ingin mengembangkan usahanya. Modal yang diberikan kepada kelompok UPPKS diberikan berbentuk pinjaman lunak tanpa membutuhkan jaminan untuk memperolehnya, dari pinjaman-pinjaman yang telah dikembalikan kemudian diputar lagi kepada kelompok-kelompok baru yang akan melakukan usaha dalam kelompok UPPKS.
- b. Produksi. Dalam proses produksi keterampilan memegang posisi yang sangat strategis dalam suatu usaha. Dalam rangka peningkatan hasil produksi kelompok UPPKS.
- c. Promosi pemasaran dan manajemen. Rendahnya pendidikan para anggota kelompok UPPKS mengakibatkan rendahnya kemampuan mereka dalam mengelola kelompok dan usaha. Bimbingan dan pelatihan dari mitra usaha sangat dibutuhkan, dan mitra usaha dapat memperoleh imbalan sesuai dengan kesepakatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Sehingga penulisan ini akan mendeskripsikan, mencatat, menjelaskan dan memaparkan permasalahan yang diteliti. Hal ini seiring dengan pendapat Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2002: 213) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini bermaksud melakukan penelusuran, deskripsi dan analisis tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di Kota Padang Panjang.

HASIL PENELITIAN

Mekanisme pelaksanaan program UPPKS diatur berdasarkan pedoman pengelolaan dan pengembangan kelompok UPPKS 20011, proses pelaksanaan program UPPKS dimulai dari tahap persiapan sampai kepada pelaksanaan. Tahap persiapan dimulai dari pengelolaan kelompok dan pengelolaan administrasi dan keuangan serta pengelolaan usaha kelompok, setelah kelompok UPPKS melakukan tahap persiapan berlanjut kepada pelaksanaan yang dimulai dari pembentukan kelompok, pembuatan proposal usaha, membangun usaha kelompok, serta mengembangkan kelompok. Sesuai dengan Mustopadidjadja (2003: 37) yang menyatakan berhasil atau gagal nya suatu kebijakan

tergantung pada beberapa kondisi yaitu: ketepatan pelaksanaan, konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaannya serta perkembangan yang terjadi.

Penyaluran dana program UPPKS diserahkan melalui koperasi AKU yang berkisar antara Rp. 2.500.000,- sampai Rp. 5.000.000,- untuk peminjaman pertama dengan bunga 0,6% per bulan, jangka waktu peminjaman ini berkisar antara 1-2 tahun, setelah bantuan didapat tanggung jawab diserahkan kepada masing-masing kelompok untuk mengurusnya dengan membuat suatu bentuk koperasi kecil dalam kelompok dan setiap anggota harus mempunyai simpanan pokok dan simpanan wajib untuk masing-masing nya, dana yang telah dilunasi akan terus diputar untuk kelompok UPPKS yang lainnya, pinjaman dapat ditingkatkan untuk tahap selanjutnya apabila kelompok dapat melunasi pinjaman tersebut dengan lancar atau tidak macet.

Perkembangan program UPPKS yang ada di kota Padang Panjang dari bulan ke bulan mengalami peningkatan yang tercatat dari 25 kelompok yang ada sudah berkembang menjadi 32 kelompok UPPKS pada saat sekarang, serta berkembangnya usaha yang dilakukan oleh kelompok UPPKS tersebut ke arah yang lebih baik, bisa meningkatkan penghasilan dari sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa bantuan yang diberikan sangat membantu masyarakat miskin terutama ibu-ibu/wanita selaku anggota kelompok UPPKS peserta program.

Pelaksanaan program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan usaha yang dilakukan oleh ibu-ibu/wanita dari golongan keluarga pra sejahtera dan sejahtera I selaku anggota dari program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yaitu diantaranya : untuk mengembangkan usaha yang dijalankan dalam kelompoknya sehingga menambah penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya, program UPPKS juga memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu/wanita yang terdaftar sebagai anggota UPPKS tentang pentingnya ikut KB dalam rangka mensukseskan program KB Nasional.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) diberikan kepada masyarakat miskin yang dikhususkan kepada ibu-ibu/wanita berupa bantuan modal usaha dalam rangka pengembangan usaha yang dijalankan dan sebagai modal bagi anggotanya tersebut untuk membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatannya. Seperti yang disampaikan oleh Suharto (2005: 58), pemberdayaan menunjuk kepada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan sehingga memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, meningkatkan pendapatannya, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan. A. M. W Pranarka dalam Ony (1996: 263) mengemukakan konsep sederhana tentang pemberdayaan masyarakat, yaitu: suatu proses yang berjalan terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Dalam program UPPKS yang menjadi sasaran dari program ini yaitu nya ibu-ibu/wanita dari keluarga pra sejahtera dan sejahtera I yang berminat dalam melakukan usaha untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pemberdayaan perempuan merupakan suatu upaya pemerintah untuk menjadikan perempuan dapat mandiri dengan keterampilan dan potensi yang dimiliki. Pemberdayaan perempuan dilaksanakan salah satunya untuk mengembangkan kemampuan perempuan agar mampu melaksanakan usaha produktif dan mampu mengembangkan usahanya tersebut. Seperti yang dikemukakan Roesmidi dan Risyanti (2006: 111) yaitu pemberdayaan perempuan merupakan tindakan usaha perbaikan atau peningkatan ekonomi, sosial budaya, politik dan psikologi baik secara individual maupun secara kolektif.

Dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera di Kota Padang panjang, tidak sepenuhnya peserta yang bisa meningkatkan kesejahteraannya melalui program ini, masih ditemukannya sekitar 35% kelompok yang tidak dapat mengembangkan usahanya untuk meningkatkan pendapatan, hal ini dikarenakan kurangnya kreatifitas dan inovasi dalam mencari dan memanfaatkan dana pinjaman yang ada. Karl dalam Sugiarti (2003: 193) berpendapat pemberdayaan dapat dianalisis melalui lima dimensi, yaitu dimensi kesejahteraan, akses sumber daya, kesadaran kritis, partisipasi dan control, namun jika dilihat dalam program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera di Kota Padang Panjang belum sepenuhnya kelima dimensi tersebut terpenuhi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belum maksimalnya pemberdayaan yang dilakukan melalui program UPPKS ini dan tentu saja tidak berhenti begitu saja karena pemberdayaan merupakan proses yang berkelanjutan sehingga masih perlu dilakukan pemberdayaan lebih lanjut agar perempuan sebagai peserta program UPPKS dapat lebih berdaya dan pada akhirnya dapat berdampak positif pada peningkatan pendapatan keluarga mereka.

Kendala pelaksanaan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kota Padang Panjang

Hansen dalam Setia Budi (2005: 27) mengemukakan jenis kendala berdasarkan asalnya terbagi atas kendala internal dan kendala eksternal, begitu juga dengan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program UPPKS di Kota Padang Panjang dapat dikategorikan kedalam dua bentuk yaitu:

- a. Kendala internal, kendala internal merupakan kendala yang menghambat pelaksanaan program UPPKS yang bersumber dari aparat atau petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program UPPKS di Kota Padang Panjang. Kendala tersebut antara lain :
 - 1) Lemahnya pengawasan terhadap program yang dilakukan oleh kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Beragamnya jenis usaha yang dilakukan pada satu kelompok membuktikan pengawasan yang lemah dari kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana Kota Padang Panjang, padahal semestinya jenis usaha yang dilakukan pada satu kelompok haruslah seragam, belum lagi permasalahan mengenai tidak adanya sanksi tegas terhadap anggota yang melakukan penunggakan dalam peminjaman bantuan, hal ini tentu menghambat perkembangan bagi program UPPKS kedepannya.
 - 2) Kurangnya modal yang bersumber dari pemerintah. Kurangnya dana bantuan yang dimiliki oleh kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana Kota Padang Panjang menjadi suatu permasalahan bagi aparat pelaksana hal ini terjadi dikarenakan masyarakat yang membutuhkan dan memenuhi syarat untuk ikut program sangat banyak sehingga tidak mencukupi untuk dana yang diberikan.
 - 3) Pembinaan yang belum merata. Permasalahan mengenai tidak meratanya pembinaan terhadap usaha kelompok UPPKS terlihat dari masih adanya beberapa kelompok yang mengeluhkan tidak mendapatkan pembinaan untuk mengembangkan produknya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dalam kelompok UPPKS.
- b. Kendala eksternal, kendala eksternal merupakan kendala yang menghambat pelaksanaan program UPPKS yang bersumber dari objek program UPPKS yang dalam hal ini yaitu kelompok UPPKS itu sendiri. Kendala tersebut antara lain :
 - 1) Pemanfaatan dana bantuan yang belum maksimal. Sasaran yang ingin dicapai dalam program UPPKS ini yaitunya peningkatan kapasitas masyarakat miskin selaku peserta program sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidup individu maupun keluarganya. Namun dalam pelaksanaannya masih ada para anggota yang tidak memanfaatkan dana bantuan ini untuk kebutuhan usahanya, mereka malah memanfaatkan dana tersebut untuk keperluan sehari-hari.

Hal ini menyebabkan usaha yang dilakukan oleh anggota kelompok UPPKS tersebut tidak dapat berkembang. Seorang ahli ekonomi yang bernama Christian Lorent Ersnt Engel mengemukakan sebuah "Hukum Konsumsi". Hukum ini berdasarkan pada hasil penelitiannya yang dilakukan pada abad ke 19 di Eropa. Menurut Engel, semakin miskin suatu keluarga atau bangsa, akan semakin besar pula persentase pengeluaran yang digunakan untuk barang pangan (Sudarman, 2004).

- 2) Kurangnya kreatifitas dan inovasi beberapa kelompok dalam mencari dan memanfaatkan sumber dana. Besarnya bantuan awal yang diberikan pada masing-masing kelompok UPPKS dirasa belum mencukupi bagi sebagian kelompok sehingga tidak begitu membantu dalam meningkatkan usaha yang dijalankan, namun bagi sebagian kelompok lainnya hal tersebut tidak menjadi Kendal penghalang untuk mengembangkan usahanya, dibutuhkan suatu kreatifitas dan inovasi dalam pemanfaatan dan pencarian dana bantuan yang ada.
- 3) Keterlambatan pengembalian pinjaman. Keterlambatan dalam pembayaran pinjaman membuat terjadinya kredit macet, sehingga menghambat untuk pengembalian pinjaman tersebut dari anggota ke kelompok, ini disebabkan kurangnya kemampuan dalam mengembangkan usaha yang dilakukan faktor lain yang menyebabkan yaitu pemanfaatan dan yang tidak diperuntukkan bagi perkembangan usaha seperti yang dipaparkan sebelumnya.

Upaya Mengatasi Kendala dalam Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kota Padang Panjang

Kartasasmita (1995: 4) mengatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat miskin lebih menekankan pada aspek kemandirian dengan memberikan bantuan dari pemerintah guna meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Upaya yang telah dilakukan oleh kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana Kota Padang panjang dalam menanggulangi kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program UPPKS di Kota Padang Panjang dapat dilihat dari kendala internal, yaitu kendala yang berasal dari petugas pelaksana, kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana Kota Padang Panjang berusaha menghimbau para keluarga dari keluarga sejahtera III untuk dapat ikut serta menyukseskan kelompok UPPKS dengan berperan sebagai bapak angkat dalam kelompok UPPKS tersebut.

Terkait dengan pembinaan Dalam hal pembinaan kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kota Padang Panjang bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang diantaranya melakukan kegiatan pameran-pameran terhadap hasil-hasil usaha dari kelompok UPPKS. Berdasarkan hasil wawancara dan penyebaran angket, sudah ada beberapa upaya dari pemerintah. Pertama kali yang sudah dilakukan adalah sosialisasi UPPKS ini pada keluarga sejahtera III selaku babak angkat. Bapak angkat membantu dalam hal permodalan, jaringan usaha, maupun keterampilan lain. Bapak angkat ini juga bertindak sebagai pembina terhadap kelompoknya baik sebagai investasi bagi keluarga sejahtera III plus itu sendiri. Selain itu upaya dalam program UPPKS ini harus selalu ditingkatkan, karena mungkin tidak selamanya Bapak Angkat mampu memberikan pembinaan dalam program UPPKS ini. Menurut hemat peneliti, perlu dibentuk pengelola yang khusus untuk mensurvei ke lapangan agar kegiatan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Bila perlu tim monevnya ditunjuk dari perguruan tinggi yang fakultas nya disesuaikan dengan bentuk jenis usaha yang diberikan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diungkapkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) diberikan kepada masyarakat miskin yang dikhususkan kepada ibu-ibu/wanita berupa bantuan modal usaha dalam rangka pengembangan usaha yang dijalankan dan sebagai modal bagi anggotanya tersebut untuk membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatannya. Walaupun pelaksanaan program UPPKS telah sesuai dengan prosedur yang ada namun belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hal ini tampak pada beberapa kelompok UPPKS, seperti pada kelompok UPPKS Melati I Pasar Usang yang mengaku belum mampu meningkatkan kesejahteraan anggota kelompoknya disebabkan jumlah bantuan modal yang diberikan kecil selain itu kurangnya kreatifitas dan inovasi dalam mencari dan memanfaatkan dana pinjaman yang ada juga membuat usaha yang dilakukan kelompok tidak berkembang.
2. Pelaksanaan program Usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera di Kota Padang Panjang sudah terlaksana, namun belum optimal, seperti lemahnya pengawasan terhadap program, kurangnya modal yang diberikan pemerintah, dan pembinaan yang belum merata. Selanjutnya mekanisme pelaksanaan program UPPKS dimulai dari tahap persiapan sampai kepada pelaksanaan. Tahap persiapan dimulai dari pengelolaan kelompok dan pengelolaan administrasi dan keuangan serta pengelolaan usaha kelompok, setelah kelompok UPPKS melakukan tahap persiapan berlanjut kepada pelaksanaan yang dimulai dari pembentukan kelompok, pembuatan proposal usaha, membangun usaha kelompok, serta mengembangkan kelompok. Penyaluran dana program UPPKS diserahkan melalui koperasi AKU yang berkisar antara Rp. 2.500.000,- sampai Rp. 5.000.000,- untuk peminjaman pertama dengan bunga 0,6% perbulan, jangka waktu peminjaman ini berkisar antara 1-2 tahun. Perkembangan program UPPKS yang ada di kota Padang Panjang dari bulan ke bulan mengalami peningkatan yang tercatat dari 25 kelompok yang ada sudah berkembang menjadi 32 kelompok UPPKS pada saat sekarang.
3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program UPPKS di Kota Padang Panjang dapat dikategorikan kedalam dua bentuk yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal adalah (1)lemahnya pengawasan terhadap program. (2)kurangnya modal yang bersumber dari pemerintah. (3)pembinaan yang belum merata. Sedangkan kendala eksternal yaitu (1)pemanfaatan dana bantuan yang belum maksimal. (2)kurangnya kreatifitas dan inovasi beberapa kelompok dalam mencari dan memanfaatkan sumber dana. (3)keterlambatan pengembalian pinjaman.

Untuk mengatasi kendala dalam proses pelaksanaan program UPPKS antara lain mengikut sertakan keluarga sejahtera III bertindak sebagai bapak angkat dalam kelompok, melakukan pembinaan, dan kendala yang bersumber dari peserta program dilakukan upaya seperti pembimbingan mengenai tujuan sebenarnya program UPPKS ini, melakukan sistem jemput bola terhadap anggota yang macet dalam pembayaran.

Saran

Dari penelitian yang dilakukan peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat miskin melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera di Kota Padang

Panjang belum maksimal. Untuk memaksimalkan hal tersebut, peneliti menyarankan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelaksanaan program dengan cara:

1. Meperkuat pengawasan yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok UPPKS yang ada, sehingga pelaksanaan yang dilakukan dapat berjalan sebagaimana mestinya
2. Memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang cara-cara pemanfaatan dan pencarian dana usaha yang lain secara baik dan benar.
3. Pemerataan pembinaan terhadap setiap kelompok UPPKS yang ada, supaya dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan penghasilannya.
4. Memberikan sanksi yang tegas terhadap kelompok yang melakukan pengembalian menunggak, hal ini bertujuan supaya dana tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk pengembangan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Badan Pusat Statistik. 2009. *Penduduk Miskin (Poor Population)*. Berita Resmi Statistis Penduduk Miskin No.04/Th.II/July. Jakarta : CBS.
- Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang. 2012. *Padang Panjang dalam angka 2011/2012*. Padang Panjang : BPS Kota Padang Panjang.
- BKKBN. 2005. “*Kelompok UPPKS sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi Keluarga*”. Jakarta: BKKBN.
- BKKBN. 2011. “*Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Kelompok UPPKS*”. Padang : BKKBN
- Budi Winarno. 2002. *Kebijakan Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Persindo.
- Burhan Bungin. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan Metode Logis Kearah Pembangunan Model Aplikasi*. Jakarta : Rajawali
- Edi Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Ginancar Kartasmita. 1995. *Pemberdayaan Masyarakat : sebuah tinjauan administrasi*. Malang : Unibraw Press.
- Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Panjang. 2009. *Profil UPPKS kota Padang Panjang*. Padang Panjang : Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Panjang.
- Lexy J Muleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- _____. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Saputra, N., & Mulia, R. A. (2020). Kontribusi Kompensasi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Agam. *Ensiklopedia Sosial Review*, 2(1), 20-28.
- Mulia, R. A. (2019). PERANAN PROGRAM KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (KJKS BMT) DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KOTA PADANG. *Ensiklopedia Sosial Review*, 1(3), 290-299.
- Mulia, R. A. (2019). INFLUENCE OF PUBLIC POLICY, PARTICIPATION OF COMMUNITY AND EDUCATION LEVEL TO PUBLIC WELFARE IN PADANG PARIAMAN DISTRICT. *Jurnal EL-RIYASAH*, 10(1), 37-56.

-
- Mulia, R. A., & Saputra, N. (2020). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA PADANG. *Jurnal EL-RIYASAH*, 11(1), 67-83.
- Mustopadidjadja. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik ; formulasi, implementasi dan evakuasi kinerja*. Jakarta : Perum Percetakan Negara RI.
- Ony S Prijono dkk. 1996. *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta : Center for Strategic and International Studies.
- Roemidi dan Risyanti. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang : Alqaprint Jatinangor.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Sugiarti. 2003. *Pembangunan Dalam Perspektif Gender*. Malang : UMM.
- Sugiyono. 2008. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Syarif Makmur. 2008. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Internet

- www.bkkbn.go.id/ diakses pada tanggal 12 Desember 2012.
- Setia Budi. 2005. *Persepsi anggota tentang para pemimpin kelompok pada masyarakat miskin kota di kecamatan bogor timur, kota bogor. Program studi ilmu penyuluhan pembangunan pasca sarjana institute pertanian bogor* (<http://www.damandri.co.id>), diakses tanggal 2 Januari 2013

Peraturan perundang-undangan

- UU No.10 Tahun 1992. *Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*.
- Inpres Nomor 3 Tahun 1996. *Tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera*.
- Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2008. *Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang Panjang*.